

Panduan Penyelenggaraan Muatan Pemberdayaan Pendidikan Kesetaraan



Dikembangkan oleh:
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Panduan Penyelenggaraan Muatan Pemberdayaan Pendidikan Kesetaraan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
1. PENDAHULUAN	1
MENGAPA PEMBERDAYAAN	1
1.1 Rasional	1
1.2 Kerangka acuan hukum	2
1.3 Tujuan	3
2. TENTANG PEMBERDAYAAN	4
APA PEMBERDAYAAN	4
2.1 Konsep pemberdayaan	4
2.1.1 Keberdayaan individual	4
2.1.2 Keberdayaan relasional	4
2.1.3 Keberdayaan kolektif	5
2.2 Tujuan pemberdayaan	5
2.2.1 Keberdayaan untuk mengatasi masalah	5
2.2.2 Keberdayaan untuk pengembangan kreativitas	5
3. BAGAIMANA PEMBERDAYAAN	6
3.1 Strategi pemberdayaan	6
3.2 Implementasi pemberdayaan	8
4. AREA PEMBERDAYAAN	9
4.1 Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah	9
4.2 Pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi	12
4.3 Pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik	14
5. CAPAIAN PEMBERDAYAAN	17
5.1. Penopang etos kemandirian	17
5.2. Penopang aktualisasi diri dan kolektif	18
5.3. Capaian keberdayaan yang diharapkan	18
6. PENILAIAN PEMBERDAYAAN	21
6.1. Prinsip penilaian	21
6.2. Standar penilaian	22
6.3 Metode penilaian	23
7. PENUTUP	24
LAMPIRAN	25
Lampiran 1: Model pendidikan pemberdayaan	25
Lampiran 2: RPP	31

1

PENDAHULUAN

MENGAPA PEMBERDAYAAN?

1.1 Rasional

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang sejak awal dirancang secara khusus untuk meningkatkan akses dan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kondisi objektif sumberdaya manusia dihadapi pendidikan kesetaraan perlu dijalankan dengan menekankan pentingnya keberdayaan peserta didik dalam mengatasi masalah dan kemampuan memasuki dunia kerja di tengah kemajuan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, pendidikan berperan sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan bagi setiap warga negara. Konstitusi menekankan pentingnya peran penyelenggara pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas lulusan di setiap jenjang pendidikan yang dibutuhkan bagi peningkatan kualitas hidup setiap warga negara.

Selain itu, sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kemajuan masyarakat, kini semakin disadari warga masyarakat bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Kesadaran semacam itu mendorong tuntutan terhadap akses dan kualitas pendidikan juga semakin meningkat di tengah masyarakat. Karena itu, pendidikan nasional ke depan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas untuk setiap warga negara. Pendidikan kesetaraan dalam hal ini berperan penting untuk menjawab kebutuhan dan tantangan ini. Warga negara yang karena berbagai sebab belum bisa mengikuti pendidikan formal harus dijamin memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan non-formal yang setara berkualitas. Demikian itu sejalan dengan misi pendidikan sepanjang hayat yang juga dijalankan pemerintah Indonesia dalam komitmennya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata atau pendidikan bagi semua.

Namun demikian, tujuan ideal itu tidak mudah begitu saja direalisasikan. Pendidikan kesetaraan di Indonesia sejauh ini menghadapi kondisi objektif adanya masalah dan tantangan khusus dihadapi berkaitan dengan peningkatan kualitas manusia dalam pembangunan. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan, khususnya di pendidikan sekolah menengah pertama dan menengah atas, penting diperhatikan dalam merancang pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Demikian pula, kenyataan bahwa masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia membutuhkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang penting untuk diorientasikan pada penciptaan tenaga kerja berkualitas untuk memasuki dunia kerja.

Berdasar kondisi objektif itu, pendidikan kesetaraan diharapkan mampu berperan mengatasinya. Pendidikan kesetaraan dalam hal ini diharapkan mampu mengatasi masalah rendahnya partisipasi pendidikan karena berbagai sebab; baik karena putus sekolah, atau drop-out, atau dislokasi peserta didik dari sekolah formal, maupun karena putus harapan akibat keterbatasan akses atau ketidakbisaan memasuki sekolah formal karena keterbatasan daya tampung. Selain itu, pendidikan kesetaraan secara prospektif juga perlu diorientasikan untuk mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan tenaga kerja terampil, menumbuhkan kewirausahaan, menumbuhkan inovasi dan kreativitas memasuki dunia kerja atau mengisi ruang publik bagi tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat.

Memperhatikan keperluan itu, pendidikan kesetaraan perlu dirancang secara khusus dengan strategi yang mengedepankan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang menekankan pentingnya keberdayaan peserta didik dalam mengatasi masalah dan dalam menciptakan peluang hidup baru di masyarakat. Meski masalah-masalah khusus dihadapi peserta didik itu membutuhkan strategi pemberdayaan secara khusus, secara umum strategi pemberdayaan penting dijadikan sebagai acuan bagi keseluruhan proses pendidikan kesetaraan. Dengan kata lain, pendidikan kesetaraan penting diorientasikan pada keberdayaan peserta didik atau pendidikan yang memberdayakan atau pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan.

1.2 Kerangka Acuan Hukum

Panduan penyelenggaraan muatan pemberdayaan dalam pendidikan kesetaraan ini dirancang mengacu pada ketentuan terdapat dalam konstitusi dan hukum nasional sebagaimana perlu dijunjung tinggi bersama. Semangat penyelenggaraan kesetaraan ini mengacu pada ketentuan terdapat pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap atau setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Tentang perlunya pendidikan non-formal sebagai bentuk layanan pendidikan bagi warga negara ditekankan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana dinyatakan, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya, ditekankan pula dalam pasal 26 ayat (6) bahwa lulusan pendidikan non-formal dihargai setara dengan lulusan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan dimaksud, sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 pasal (4), adalah standar mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membenahi karakter bangsa.

Sementara itu, tentang penjaminan status atau kedudukan pendidikan non-formal telah ditekankan dalam Permendikbud No 14/2007 bab I yang menyebutkan

bahwa setiap peserta didik yang lulus ujian paket A, paket B dan Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C memiliki eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal, dalam hal ini SMA dan SMK, dalam memasuki dunia kerja.

Sementara itu, tentang perlunya pelaksanaan memadai untuk menjamin kualitasnya, Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pasal 305 menekankan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Selanjutnya, ditekankan pula dalam pasal 306 bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan tugas antara lain menyiapkan perumusan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, serta tata kelola pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

1.3 Tujuan

Penyusunan panduan penyelenggaraan muatan pemberdayaan dalam pendidikan kesetaraan ini secara khusus dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

- (1) Memberikan penjelasan mengapa strategi pemberdayaan perlu dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
- (2) Memberikan kejelasan muatan-muatan khusus pemberdayaan yang perlu diberikan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
- (3) Memberikan tolok ukur keberhasilan pendidikan kesetaraan dari keberdayaan peserta mengatasi masalah, mengembangkan diri dan berkontribusi pada dunia kerja;
- (4) Memberikan acuan bagaimana muatan-muatan pemberdayaan itu diberikan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan

2 TENTANG PEMBERDAYAAN

APA PEMBERDAYAAN?

2.1. Konsep pemberdayaan

Keberdayaan peserta didik, sebagaimana menjadi tujuan dimaksudkan dalam panduan ini, meliputi dua bentuk keberdayaan, yaitu keberdayaan individual dan kolektif. Hal itu mengacu pada pengertian pemberdayaan dan perlunya keduanya dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

Pemberdayaan pada dasarnya bisa dimaknai memiliki dua arti. Pertama, pemberdayaan dalam pengertian sebagai kepemilikan daya atau kuasa untuk bertindak. Keberdayaan dalam arti ini bersifat memusat dalam diri subjek atau individu yang mandiri atau pribadi-pribadi yang otonom atau berdaulat dengan segala potensi dan kemampuan dalam bertindak. Keberdayaan dalam arti ini kita sebut keberdayaan individual.

Kedua, pemberdayaan dalam arti kapasitas bertindak dalam hubungan atau relasi dengan orang lain atau dalam menjalankan kelembagaan atau dalam kerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan. Keberdayaan dalam arti ini tidak hanya bersumber atau melekat pada individu mandiri atau berdaulat seperti pada keberdayaan dalam arti satu dimensi seperti di atas, tetapi juga berdimensi relasional; yaitu keberdayaan dalam hubungan dengan pihak lain, atau orang lain, dalam kapasitas bekerjasama atau melakukan tindakan bersama. Keberdayaan dalam arti ini kita sebut keberdayaan kolektif.

Kedua bentuk keberdayaan ini sangat penting untuk dicapai dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Berikut ini kita uraikan arti ketiganya dan perbedaan satu sama lain untuk diperoleh kejelasan bagaimana mewujudkannya dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

2.1.1 Keberdayaan individual

Keberdayaan individual dalam arti kapasitas individual dalam bertindak diperlukan agar peserta didik mampu dan berdaya mengembangkan diri sejalan dengan tingkat perkembangannya dan kemajuan berlangsung di masyarakat. Muatan pemberdayaan ini diberikan baik dalam bentuk penguatan kapasitas diri maupun kemampuan mengenali struktur sekitar yang menghambat pengembangan diri dan sekaligus yang memberi peluang bagaimana menggunakannya, khususnya menggunakan kelembagaan yang ada, bagi penguatan penguatan kapasitas dalam pengembangan diri.

2.1.2 Keberdayaan relasional

Selain keberdayaan individual, kapasitas peserta didik dalam arti relasional diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat sekitar dan dunia kerja. Keberdayaan dalam arti kapasitas bertindak secara relasional ini ditentukan bukan hanya oleh pribadi atau individu peserta didik, tetapi secara kontigen atau terbuka ditentukan oleh momentum berlangsungnya relasi atau hubungan sosial sebagai hasil dari tindakan kolektif. Dalam konteks pendidikan kesetaraan hal itu berarti kapasitas peserta didik ditentukan bukan oleh kemampuan peserta didik

semata, melainkan sebagai hasil dari kapasitasnya dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan bersama secara kolektif, atau dalam menjalankan kelembagaan atau dalam mengubah dan memperbaiki lingkungan, atau masyarakatnya, atau berkontribusi pada dunia kerja, atau pada perbaikan kehidupan publik.

2.1.3 Keberdayaan kolektif

Selain bersifat satu arah, dari individu ke struktur, atau dari pencapaian kesadaran diri mengubah lingkungan, masih dalam konteks relasional, pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan membentuk keduanya, baik mengembangkan diri maupun secara kolektif dalam artinya yang progresif. Dalam praktek pemberdayaan ini ditekankan pembentukan diri sekaligus struktur atau kelembagaan melalui proses emansipasi dalam kepemimpinan kelompok. Berpijak pada kenyataan bahwa masing-masing individu sesungguhnya lemah dalam menggapai realitas, maka pembentukan identitas sebagai subjek yang baru atau lebih berdaya penting dilakukan. Demikian itu hanya bisa dikembangkan melalui pelibatan individu pada kehidupan publik atau dalam bekerjanya suatu praktek kelembagaan terdapat di masyarakat.

2.2. Tujuan pemberdayaan

Pemberdayaan dalam arti membentuk keberdayaan pribadi dan perbaikan kehidupan publik, sebagaimana dikemukakan di atas, sangat diperlukan untuk menjadikan peserta didik berdaya dalam pengembangan diri dan berkontribusi pada lingkungan atau masyarakat sekitar dan dunia kerja. Pemberdayaan dalam hal ini memiliki tujuan selain pengembangan kapasitas diri mengatasi masalah, juga memberikan kontribusi para tumbuhnya kreatifitas yang sangat penting artinya bagi produktivitas dan kemajuan publik.

2.2.1. Keberdayaan untuk mengatasi masalah

Pemberdayaan dilakukan disini agar siswa atau peserta didik memiliki kemandirian dalam pengembangan diri dan mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi. Pemberdayaan dalam arti ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan sedemikian bisa mengembangkan potensi diri dan dengan itu mampu mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi. Selain mengatasi keterbatasan dan hambatan yang ada dalam diri, keberdayaan dalam arti ini juga dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi dihadapi.

2.2.2 Keberdayaan untuk pengembangan kreativitas

Pemberdayaan juga dimaksudkan lebih dari peningkatan kapasitas diri, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan publik. Dalam arti terakhir ini, pemberdayaan bertujuan menumbuhkan keberdayaan dalam hal mencipta, atau menumbuhkan kreativitas sangatlah diperlukan. Keberdayaan dalam arti ini dikembangkan melalui proses belajar, diskusi bersama, bekerjasama dalam mengatasi masalah dan mendorong kemajuan masyarakat. Dengan demikian, disini pendidikan kesetaraan dijalankan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga kemampuan mengatasi masalah, atau mengatasi kerentanan dalam pembentukannya sebagai warga yang mandiri, dan dengan itu mampu memberi kontribusi pada pengembangan masyarakat, dunia kerja, pembangunan bangsa dan negara, atau terhadap perbaikan kehidupan publik.

3

BAGAIMANA PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan dilakukan untuk mencapai keberdayaan warga belajar dalam pengembangan diri, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dan memberi kontribusi pada pengembangan lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapainya diperlukan suatu strategi khusus dengan mengkombinasikan strategi pendidikan dan strategi pemberdayaan. Dalam hal ini strategi pendidikan dan pemberdayaan dipadukan sedemikian membuat pendidikan non-formal memiliki kemampuan melakukan emansipasi dan transformasi warga belajar untuk mencapai kualitas lulusan sebagaimana pula diharapkan dalam pendidikan formal.

Sebagaimana ditekankan di atas, dalam kaitan dengan pendidikan kesetaraan, keberdayaan warga belajar yang hendak dicapai dari strategi pendidikan ini adalah tumbuhnya kemandirian atau otonomi diri. Dalam hal ini keberdayaan itu ditunjukkan dalam kemampuan bukan hanya menghadapi dan mengatasi persoalan atau permasalahan, tetapi juga mampu mengubah atau mentransformasikan diri melalui keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. Keberdayaan warga belajar dalam hal ini ditunjukkan dalam kreativitas, inovasi dan keberanian dalam mengajukan alternatif mengatasi masalah serta kemampuan mengambil keputusan atas diri dan dalam kaitan dengan orang lain dan dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan sosial atau kehidupan publik.

3.1. Strategi pemberdayaan

Bagaimana pemberdayaan dilakukan sangatlah bergantung pada karakteristik terdapat dalam pendidikan kesetaraan. Sebagaimana diketahui, pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat atau pendidikan komunitas berorientasi pada pemecahan masalah-masalah hidup mendesak dihadapi warga komunitas. Sebagian besar praktek pendidikan kesetaraan tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai bagian dari inisiatif dan prakarsa masyarakat; dari, oleh, dan untuk warga masyarakat, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan khusus pendidikan, ketrampilan dan kecakapan hidup dalam mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi dan masalah hidup mendesak di hadapi warga belajar dan warga komunitas.

Berbeda dengan pendidikan formal yang dirancang berdasar tingkat perkembangan dan kemampuan adaptasi warga belajar menghadapi perubahan di masyarakat dan lingkungan sekitar, pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan bisa dikategorikan sebagai pendidikan orang dewasa untuk memecahkan masalah-masalah nyata dihadapi dalam diri, keluarga dan komunitas sekitar. Pendidikan kesetaraan disini merupakan bagian dari pendidikan komunitas berperan untuk memberdayakan komunitas. Dalam arti ini, pendidikan kesetaraan tidak begitu mengenal perjenjangan pendidikan yang ketat yang dirancang untuk meningkatkan adaptasi warga belajar terhadap perubahan di masyarakat dan lingkungan sekitar seperti dalam pendidikan formal, melainkan lebih merupakan bentuk tindakan atau praktek hidup untuk mengatasi masalah dan intervensi etik untuk melakukan perubahan.

Sebagai suatu intervensi etik, disini pendidikan kesetaraan dijalankan sebagai suatu tindakan dan intervensi etik untuk menemukan kembali identitas yang telah mengalami disintegrasi atau dislokasi dan mengatasi masalah dihadapi untuk rekonstruksi identitas. Pendidikan dalam hal ini secara khusus diarahkan untuk memulihkan integritas kepribadian, mengembangkan identitas kewargaan dan kewarganegaraan, dan menumbuhkan pandangan nasionalis atau pandangan nasional di kalangan warga negara. Pendidikan sebagai tindakan dan intervensi etik disini berarti pula bahwa pendidikan secara khusus diarahkan mampu mengatasi masalah putus harapan atau dislokasi dialami warga dalam mencapai cita-cita diharapkan sebagai warga negara penuh martabat dan kehormatan.

Dalam konteks pendidikan kesetaraan, pendidikan sebagai suatu bentuk intervensi etik disini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan diarahkan untuk memberikan muatan etik, semangat atau etos kerja warga belajar dan komunitas sehingga mampu mengembangkan identitas diri sebagai warga negara mandiri dan bertanggungjawab pada perkembangan diri dan kemajuan komunitas, masyarakat, bangsa dan negara. Berbeda dengan pendidikan formal yang dijalankan dalam struktur kelembagaan yang ketat, pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan dalam hal ini dijalankan sebagai bagian dari pendidikan masyarakat dan pemberdayaan komunitas mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Dalam hal ini, pendidikan kesetaraan sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri memberikan ruang kebebasan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, potensi diri, dan pengembangan diri sesuai tujuan yang diharapkan dan dicita-citakan. Pengembangan kreatifitas dan kemandirian dalam menentukan masa depan dalam hal ini sangat penting dalam praktek pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam arti ini bukan semata dimaknai secara negatif sebagai pendidikan non-formal atau bukan formal, dan pula juga bukan semata sebagai pengganti ketika warga belajar tidak bisa memasuki pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, tetapi lebih dari itu juga bisa menjadi sebuah pilihan untuk pengembangan diri bagi siapa saja seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arti ini, pendidikan kesetaraan memiliki bentuk dan praktek pendidikan yang sangat beragam, tidak hanya dilaksanakan di rumah bagi peserta didik khusus atau istimewa tersendiri, tetapi juga bagi peserta didik dari berbagai kalangan seperti dari kalangan pemuda, perempuan, kelompok marginal, kelompok teresklusi, kelompok menengah dan atas sedemikian mencapai pendidikan untuk semua. Dalam hal ini, kemudian, permasalahannya adalah; bagaimana hal itu bisa direalisasikan?

3.2. Implementasi pemberdayaan

Sebagaimana telah disebutkan di muka, pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk memperoleh daya atau kekuatan dan kemampuan individual dan kolektif untuk membuat keputusan atau dalam bertindak. Berdasar pengertian tersebut, dalam konteks pendidikan masyarakat dan pemberdayaan komunitas, pemberdayaan perlu diarahkan pada area-area khusus terdapat di masyarakat atau di ranah kehidupan sosial atau publik untuk mencapai tujuan sedemikian meningkatkan keberdayaan warga belajar. Tiga (3) area pemberdayaan individual dan kolektif dalam area-area di ranah publik dalam hal ini bisa diidentifikasi; (1) pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah; (2) pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi; dan (3) pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang dan peluang publik.

Bagaimana pemberdayaan dilakukan di ketiga area tersebut, hal itu secara khusus akan kita bahas dalam bagian selanjutnya. Termasuk di dalamnya bagaimana pemberdayaan individual dan kolektif dilakukan di ketiga area tersebut beserta tingkatan kemandirian dan keberdayaan hendak dicapai.

4

AREA PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam bab sebelumnya perlu ditempatkan dalam area pemberdayaan dimana didalamnya berlangsung penguatan kapasitas diri dan pengembangan kehidupan publik. Penguatan kapasitas diri dalam hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan kehidupan publik. Kapasitas diri, atau keberdayaan pribadi, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan publik sebab keberadaan pribadi-pribadi yang baik pastilah akan membuahkan publik yang baik. Demikian pula sebaliknya, dalam kehidupan publik yang baik akan membuahkan pribadi-pribadi yang baik pula. Pengembangan kapasitas diri untuk perbaikan publik ini penting dilakukan di ketiga area pemberdayaan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah, pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi dan pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik.

Selain itu, sehubungan dengan perbedaan potensi dimiliki warga belajar, pemberdayaan berlangsung dalam pendidikan kesetaraan penting memperhatikan tingkatan perkembangan warga belajar yang, sebagaimana disebutkan di atas, memiliki latar belakang yang sangat beragam karena berbagai sebab tidak bisa melanjutkan atau memasuki sekolah atau pendidikan formal. Namun demikian, sebagaimana pula telah ditekankan di atas, semua itu hendaknya dijalankan dengan tetap memperhatikan standar kualitas lulusan sebagaimana diharapkan sekolah formal atau dunia pendidikan. Berikut ini dipaparkan pemberdayaan dalam ketiga area tersebut dalam praktek pendidikan kesetaraan.

4.1. Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah

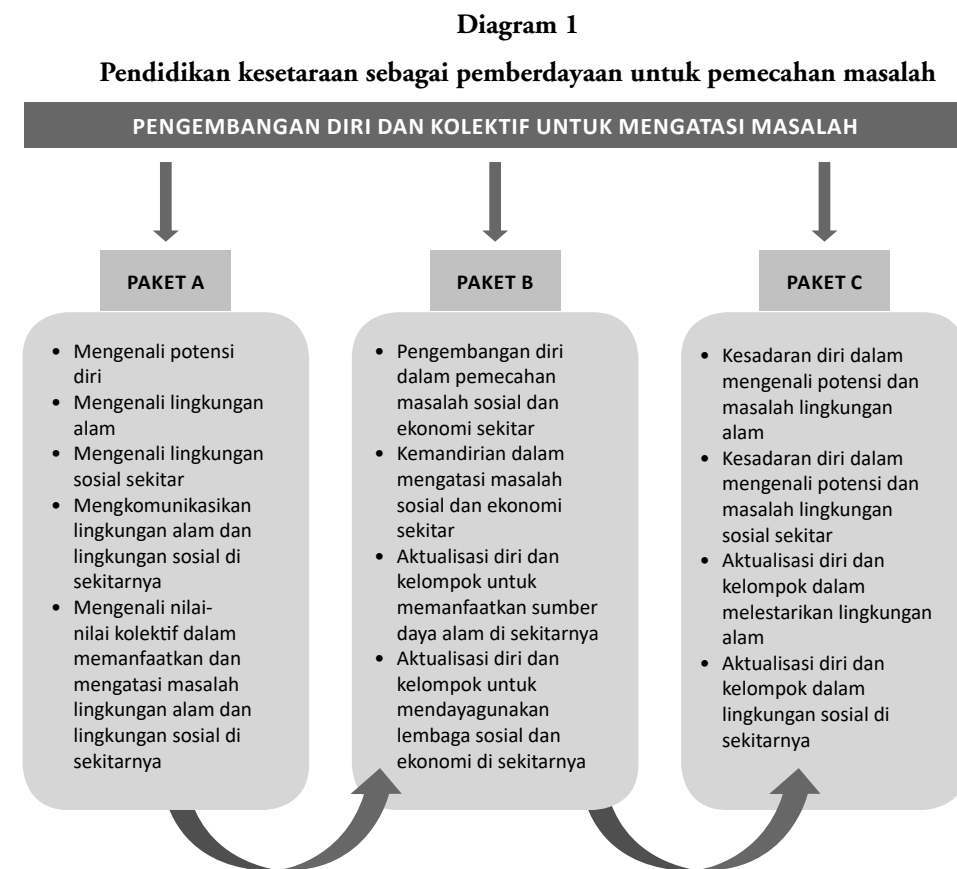
Pengembangan diri dan kolektif untuk mengatasi masalah merupakan tujuan sekaligus cara pemberdayaan untuk mendapatkan kualitas pendidikan memadai sedemikian warga belajar mampu mengatasi masalah hidup sosial-ekonomi mereka hadapi. Area ini merupakan area pemberdayaan khusus dimaksudkan untuk mengatasi masalah, atau problem solving empowerment. Demikian itu berlangsung di setiap jenjang pendidikan kesetaraan dengan mengacu pada kualitas lulusan dicapai dalam pendidikan nasional, baik pendidikan formal maupun nonformal, atau pendidikan luar sekolah atau pendidikan sepanjang hayat.

Sebagaimana ditekankan dalam pendidikan formal, kemampuan mengenali diri dan lingkungan alam dan sosial sekitar merupakan kualitas hendak dicapai tingkatan sekolah dasar. Demikian pula dalam pendidikan kesetaraan, meski secara khusus harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan tujuan khusus dari pendidikan ini, pemberdayaan hendak dicapai pendidikan kesetaraan setingkat sekolah dasar, atau pendidikan kesetaraan paket A, mengacu pada kualitas dicapai pendidikan formal, hendaknya ditekankan pada kemampuan mengenali potensi diri, mengenali lingkungan alam, dan mengenali lingkungan sosial sekitar.

Selanjutnya, pemahaman dan kemampuan dasar yang telah dimiliki dari praktek pendidikan kesetaraan paket A akan diperkuat dan dikembangkan di sekolah menengah pertama, atau pendidikan kesetaraan paket B. Pada pendidikan kesetaraan paket B ini, pemahaman potensi diri kemudian diarahkan menjadi motivasi untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar. Dalam hal ini diharapkan adanya kemampuan aktualisasi diri dari warga belajar, misalnya, dengan menumbuhkan kesadaran, inisiatif dan gagasan dari warga belajar akan pentingnya kelestarian lingkungan alam dan perbaikan kehidupan sosial atau publik berdasar nilai-nilai kebaikan yang ada dan mendiskusikannya untuk menumbuhkan kebersamaan dalam kehidupan sosial atau publik.

Demikian itu terus dikembangkan dalam tingkatan selanjutnya di pendidikan kesetaraan paket C atau setingkat sekolah menengah atas. Sebagaimana diharapkan dalam pendidikan formal dalam tingkatan ini, pengembangan diri dan kelompok dalam pemecahan masalah penting difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah dan sebab-sebab terjadinya sesuatu masalah, baik itu masalah ekonomi maupun masalah sosial yang menghambat pencapaian tujuan atau cita-cita. Masalah itu bisa muncul karena faktor dalam diri atau bisa juga dari luar. Masalah dari dalam perlu diatasi lewat, sebagaimana ditekankan Erick From, melalui pengakuan dan penyadaran akan potensi diri. Sementara itu, faktor dari luar diatasi dengan penguatan kapasitas mengatasi masalah, misalnya melalui pengembangan pengetahuan dan ketrampilan mengatasi masalah, seperti dalam memelihara kelestarian lingkungan alam dan pengembangan komunitas atau melakukan perbaikan kehidupan publik.

Berikut ini, sebagaimana dipaparkan dalam diagram 1, kita paparkan pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan dalam arena pemberdayaan untuk mengatasi masalah. Pencapaian keberdayaan dilakukan di masing-masing tingkatan mulai dari tingkat sekolah dasar atau kesetaraan paket A, tingkat sekolah menengah atau paket B, dan tingkat menengah atas atau pendidikan kesetaraan paket C.



Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 1 diatas, pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan dijalankan secara bertingkat dan meluas ruang lingkupnya mulai dari tingkatan sekolah dasar atau pendidikan kesetaraan paket A, dilanjutkan tingkatan sekolah menengah pertama atau pendidikan kesetaraan paket B hingga tingkatan sekolah menengah atas atau pendidikan kesetaraan paket C. Dalam tingkatan pendidikan kesetaraan paket A tekanan diberikan pada keberdayaan mengenali potensi diri, mengenali lingkungan alam, dan mengenali lingkungan sosial sekitar. Termasuk di dalamnya keberdayaan mengkomunikasikan pada orang atau pihak lain dengan mengacu pada nilai-nilai kebersamaan.

Sementara itu, dalam tingkatan pendidikan kesetaraan paket B tekanan diberikan pada keberdayaan akan tumbuhnya kesadaran diri dalam mengenali potensi diri dan memahami masalah di lingkungan alam dan sosial sekitar atau dalam kehidupan publik. Demikian itu penting untuk aktualisasi diri dalam melestarikan lingkungan alam dan ujuk kebolehan dalam mengembangkan kehidupan publik. Sedangkan dalam tingkatan pendidikan kesetaraan paket C tekanan diberikan pada keberdayaan dalam aktualisasi diri dan dalam memanfaatkan sumberdaya alam serta menata kehidupan publik sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat.

4.2. Pengembangan diri dan kolektif untuk apresiasi

Pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan selain diorientasikan pada pemecahan masalah sosial-ekonomi juga diarahkan pada kemampuan memberikan penilaian atau apresiasi terhadap apa-apa yang dilakukan dan dihasilkan orang lain yang bermanfaat baik pada diri sendiri maupun pada publik. Termasuk dalam kemampuan apresiasi adalah memberikan pengakuan, penghargaan, memberi arti, dan memberi dukungan terhadap kemanfaatan hasil karya atau kerja keras dan kebaikan dihasilkan orang lain.

Dalam kaitannya dengan lingkungan alam, apresiasi berarti mengakui dan menghargai keindahan, keanekaragaman dan kemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kebaikan publik. Sementara itu, dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, apresiasi bisa diwujudkan dalam bentuk menghargai kearifan dan modalitas sosial dengan segala kemanfaatan atau kemaslahatan yang ada bagi kehidupan publik, seperti kepercayaan terhadap orang lain, kepedulian, tanggungjawab, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Termasuk disini menghargai keragaman dan keindahan seni yang pada ujungnya tumbuh kecintaan dan sikap memiliki serta melestarikannya. Dalam hal ini, tidak terkecuali pula kemanfaatannya bagi pengembangan sumberdaya alam dan manusia, termasuk kemanfaatannya sebagai sumberdaya ekonomi sehingga bukan hanya berguna bagi diri sendiri tetapi juga orang lain atau publik. Khusus dalam kaitan dengan nilai pertukaran, sumberdaya ekonomi dan alat tukar berupa uang penting untuk dijaga kualitas dan nilainya sedemikian sehingga menumbuhkan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Keberdayaan dalam jenis ini, dalam kemampuan mengapresiasi, penting dikembangkan di setiap jenjang pendidikan kesetaraan mulai dari paket A hingga Paket C. Pada tingkatan paket A apresiasi diorientasikan pada pengakuan dan penghargaan terhadap lingkungan alam maupun sosial sekitar. Selanjutnya, pada paket B apresiasi diorientasikan pada lingkungan alam dan sosial sekitar yang lebih luas. Termasuk di dalamnya apresiasi terhadap perbedaan dan pluralitas yang ada baik di lingkungan alam maupun di masyarakat. Kemampuan apresiasi demikian itu pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan pada paket C apresiasi ditekankan pada kemampuan untuk mengakui dan menghargai serta memanfaatkan alam sekitar. Termasuk di dalamnya, warga belajar diharapkan memiliki pemikiran dan tindakan untuk memanfaatkan alam untuk kehidupan mereka tanpa merusaknya. Demikian itu juga berlaku pada nilai sosial berlaku di masyarakat. Pengakuan dan penghargaan secara bersama akan memberikan kemanfaatan yang lebih pada kehidupan publik. Berikut ini kita paparkan keberdayaan dalam.

Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam diagram 2, kita paparkan keberdayaan dalam area apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar semestinya dicapai dalam pendidikan kesetaraan. Sebagaimana dipaparkan dalam tiap jenjang, keberdayaan dalam apresiasi ini sangat penting selain memberikan penghargaan

terhadap orang lain, yang dalam hal ini berarti meningkatkan keberdayaan orang lain, juga penghargaan terhadap kualitas diri, atau penguatan keberdayaan diri.

Diagram 2.
Keberdayaan apresiasi dalam tingkatan pendidikan kesetaraan



Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 2, dalam pendidikan kesetaraan Paket A, apresiasi terhadap kemampuan diri merupakan prasyarat penting dimiliki warga belajar dalam melakukan apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar. Termasuk di dalamnya menghargai perbedaan dan keragaman yang ada pada lingkungan alam dan sosial sekitar. Sementara itu, pada pendidikan kesetaraan Paket B pemahaman yang lebih terhadap sumberdaya alam dan sosial akan selain mendorong tumbuhnya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman yang ada juga mengenali kemanfaatan sumberdaya alam dan sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pada pendidikan kesetaraan Paket C tekanan lebih diberikan pada kemampuan warga belajar dalam mempromosikan dan mempresentasikan kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi dalam menopang pembangunan bangsa dan negara.

4.3. Pengembangan diri dan kolektif untuk mengisi ruang publik

Pengembangan diri untuk mengisi ruang publik merupakan keberdayaan tertinggi dari tingkatan pendidikan kesetaraan. Ruang publik dimaksud adalah tempat dan ruang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas sosial atau publik seperti pembentukan wacana pembangunan, tindakan atau praktek pembangunan, pertukaran, koneksi, membangun tempat publik untuk ekspresi seperti plaza, taman, panggung, dan sumber daya publik lain. Sementara itu, mengisi ruang publik dimaksud adalah suatu tindakan yang memberikan arti pada kehidupan publik seperti melakukan unjuk kebolehan dalam praktek pembangunan, penyampaian pesan, promosi, penegakan etika, melakukan penataan, mewujudkan keteraturan, memberikan kebermanfaatn bagi publik, menciptakan keselarasan diantara warga, membuat keindahan warna-warni yang memberikan semangat pencerahan dalam membangun dan menjalankan pembangunan bangsa di ruang atau ranah publik.

Demikian itu, dalam ranah sosial atau publik yang lebih luas, termasuk di dalamnya mengisi dengan wacana pembangunan, artikulasi aspirasi, memberikan arti, makna dalam representasi serta membangun koneksi dan pertukaran seperti membangun relasi, interaksi, responsif, memberikan nilai lebih, kompetisi, kolaborasi, negosiasi, persuasi untuk mendapatkan kemanfaatan bersama dan pembentukan kepentingan atau kebaikan publik. Berbagai media bisa digunakan untuk itu baik media komunikasi langsung, media cetak, media elektronik, internet, maupun media sosial yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi menyertainya.

Dalam kaitan dengan keberdayaan dalam mengisi ruang publik seperti itu, warga belajar di pendidikan kesetaraan Paket A diharapkan mengenali ruang-ruang publik yang ada di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri, baik secara sendiri maupun secara kolektif. Dalam Paket A ini, peserta bisa diajak mengidentifikasi beragam ruang publik yang ada di lingkungan sekitar sekaligus dengan karakteristiknya sebagaimana ciri-ciri di atas. Misalnya ruang publik untuk interaksi sosial seperti pertemuan-pertemuan diskusi di kampung baik secara formal maupun informal, aneka tempat saling betukar gagasan; ruang publik untuk interaksi ekonomi baik berupa bangunan fisik seperti pasar, atau tempat terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli atau proses tukar; atau ruang untuk unjuk gagasan sendiri atau kelompok, seperti pagelaran seni budaya.

Sementara itu, dalam pendidikan kesetaraan Paket B pemberdayaan diarahkan kemampuan penyajian gagasan, unjuk kemampuan di ruang publik, memilih ruang publik yang sesuai untuk unjuk kemampuan dan bahkan menata bersama serta menghadirkan ruang publik untuk kepentingan bersama. Misalnya, memanfaatkan suatu sudut untuk ruang baca bersama sehingga bisa dimanfaatkan sendiri dan orang lain. Sudut ruang bisa menjelma sebagai ruang publik dimana sekelompok orang bisa melakukan interaksi, relasi dan bahkan membangun komunikasi dan unjuk gagasan atau artikulasi.

Sedangkan dalam pendidikan kesetaraan Paket C keberdayaan hendak dicapai ketika warga belajar telah mampu menyuarakan kepentingan bersama di ruang publik, serta menjadi representasi suatu kelompok dalam menyuarakan kepentingan bersama atau publik dengan memanfaatkan ruang publik yang ada. Dewasa ini telah banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan baik secara individu maupun bersama untuk aksi-aksi yang berguna baik untuk kehidupan sosial, seperti membangun kesadaran bersama merawat ruang publik, melakukan dialog-dialog di ruang publik atau melakukan pagelaran seni dan budaya di ruang publik. Selain itu ruang publik juga bisa secara bersama maupun kelompok dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan ekonomi. Adanya teknologi berbasis informasi seperti penggunaan media sosial yang bisa diakses di ruang publik bisa secara positif dimanfaatkan untuk mempromosikan diri, produk, atau karya serta kepentingan publik.

Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam alur diagram 3, kita paparkan pemberdayaan sebaiknya dilakukan dalam area keberdayaan diri dan kolektif untuk mengisi peluang dan ruang publik yang hendak dicapai berdasar tingkatan terdapat dalam pendidikan kesetaraan.



Sebagaimana dipaparkan dalam diagram 3 diatas, keberdayaan mengisi ruang publik hendak dicapai pendidikan kesetaraan Paket A ditekankan pada kemampuan mengenali ruang-ruang publik sebagai pengembangan diri. Selain itu, keberdayaan ditekankan pada kemampuan menggunakan ruang-ruang publik secara bersama untuk pengembangan diri. Sementara itu, dalam Paket B keberdayaan ditekankan pada kemampuan presentasi diri di ruang publik yang dalam hal ini perlu disertai kemampuan memilih ruang publik yang tepat untuk mengisi ruang publik. Kemampuan untuk presentasi diri di ruang publik dalam hal ini perlu ditopang kemampuan merespon kepentingan publik yang muncul. Semua itu bila bisa dicapai akan menjadikan warga belajar mampu menata ruang publik secara bersama untuk menghadirkan atau menciptakan kepentingan dan kebaikan publik.

Sedangkan di tingkatan pendidikan kesetaraan Paket C, sebagai tingkatan tinggi dari pendidikan kesetaraan, keberdayaan ditekankan pada kemampuan unjuk kebolehaan di ruang publik. Selain itu, dalam tingkatan ini warga belajar diharapkan mampu mepresentasikan kepentingan bersama di ruang publik. Termasuk di dalamnya kemampuan mengkomunikasikan kepentingan bersama atau kebaikan publik di ruang publik. Mempromosikan kebermanfaatn bersama di ruang publik merupakan kelanjutan dari itu untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, yang terakhir, apabila terjadi hambatan untuk merealisasikannya, negosiasi diperlukan agar kegunaan sumberdaya publik yang ada bisa dimanfaatkan secara bersama.

5

CAPAIAN PEMBERDAYAAN

Sebagaimana dikemukakan di muka, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa tujuan utama dari pendidikan kesetaraan adalah untuk mencapai kemandirian diri dalam hal memberikan apresiasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitar hingga kemampuan aktualisasi diri secara kreatif dan inovatif di ruang publik. Tujuan demikian dicapai melalui strategi memadukan pendidikan dan pemberdayaan, atau disebut strategi pendidikan yang memberdayakan, yaitu suatu praktek pendidikan kesetaraan bersifat emansipatoris dan transformatif menjadikan warga belajar mampu mandiri mengembangkan diri dan memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan publik. Demikian itu diharapkan berlangsung di setiap area pemberdayaan; baik untuk memecahkan masalah dihadapi, kemampuan apresiasi, atau menyadari potensi diri dan pihak lain, serta memiliki kemampuan mengisi ruang publik untuk kemajuan masyarakat, dunia usaha, peluang kerja, atau berkembangannya kehidupan sosial dan ekonomi kreatif secara nasional.

Tujuan itu dicapai secara bertahap mulai dari praktek pendidikan tingkat dasar, atau pendidikan kesetaraan Paket A, pendidikan kesetaraan Paket B, hingga pendidikan kesetaraan tingkat atas, atau pendidikan kesetaraan Paket C. Pelaksanaan ketiga tahapan pendidikan kesetaraan itu secara akumulatif diharapkan mampu mencapai tujuan sebagaimana hendak dicapai sedemikian mencapai suatu tingkat kemandirian, integritas kepribadian, dan kredibilitas tersendiri dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan itu, secara emansipatoris perlu dilancarkan suatu pergerakan pendidikan nasional yang memadukan berbagai area dan tingkatan pendidikan ditopang dua (2) hal penting, yaitu: (1) etos kemandirian; dan (2) aktualisasi diri dan kolektif secara aktif, kreatif dan inovatif untuk memajukan kehidupan publik. Berikut kita paparkan topangan keduanya dalam mewujudkan pendidikan kesetaraan yang secara emansipatoris memberdayakan itu.

5.1. Penopang etos kemandirian

Etos kemandirian sangat penting untuk mewujudkan kemandirian diri dan aktualisasi individual dan kelompok bagi perbaikan kehidupan publik. Etos kemandirian itu dapat ditemukan dalam kemampuan individu dan kelompok mengkomunikasikan potensi diri dan kelompoknya serta cita-citanya dalam meraih masa depan. Termasuk di dalamnya kemampuan mengenali dan memahami potensi alam, pluralitas kehidupan alam, flora dan fona yang ada.

Kemampuan individu dan kelompok mengkomunikasikan potensi sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai kerjasama, saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sosial, seperti dalam keluarga dan ketetangaan, merupakan kualitas lain perlu dimiliki dari etos kemandirian. Kepemilikan etos kerja demikian itu membawa implikasi luas dalam menumbuhkan kemampuan pengembangan diri dan kelompok dalam pemecahan masalah sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sosial yang ada di sekitar.

5.2. Penopang aktualisasi diri dan kolektif

Selain etos kemandirian, penopang penting lainnya adalah aktualisasi diri dan kolektif untuk secara aktif, kreatif dan inovatif memperbaiki kehidupan publik. Termasuk di dalamnya pengakuan dan penghargaan terhadap potensi diri bahwa setiap individu memiliki kemampuan berdasar pengalamannya guna menumbuhkan kepercayaan diri dan menuju kemandirian. Selain itu juga pengakuan dan penghargaan bahwa alam sekitar memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat baik secara individu maupun secara komunal atau bersama. Pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial yang positif yang selama ini berlaku di masyarakat merupakan kualitas aktualisasi yang lain. Pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat juga merupakan kualitas sangat penting diaktualisasikan. Pengakuan demikian itu mendorong warga belajar mampu mengenali nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat guna pemecahan masalah ekonomi, seperti saling percaya, menghargai gagasan orang lain, kejujuran, dan keterbukaan.

Selain pengakuan diatas, upaya memberikan dukungan penting pula dilakukan seperti secara individual dan kelompok mempromosikan mengenai manfaat alam sekitar bagi kehidupan manusia. Peserta bisa mengajak orang atau kelompok lain untuk mendayagunakan alam sebagai sumberdaya dan perlu dijaga serta dilestarikan. Selain itu, mempromosikan manfaat nilai-nilai sosial bagi kehidupan manusia juga merupakan kualitas penting dimiliki. Warga belajar disini bisa mengajak orang atau kelompok lain untuk membangun sikap dan perilaku positif, seperti menghargai orangtua, menjunjung kejujuran, memilih bekerjasama serta menyusun tujuan dan visi bersama. Demikian pula, kemampuan aktualisasi untuk secara individu dan kelompok mempromosikan keragaman seni yang ada penting untuk mengembangkan seni yang sangat penting bagi perkembangan budaya di dalam masyarakat.

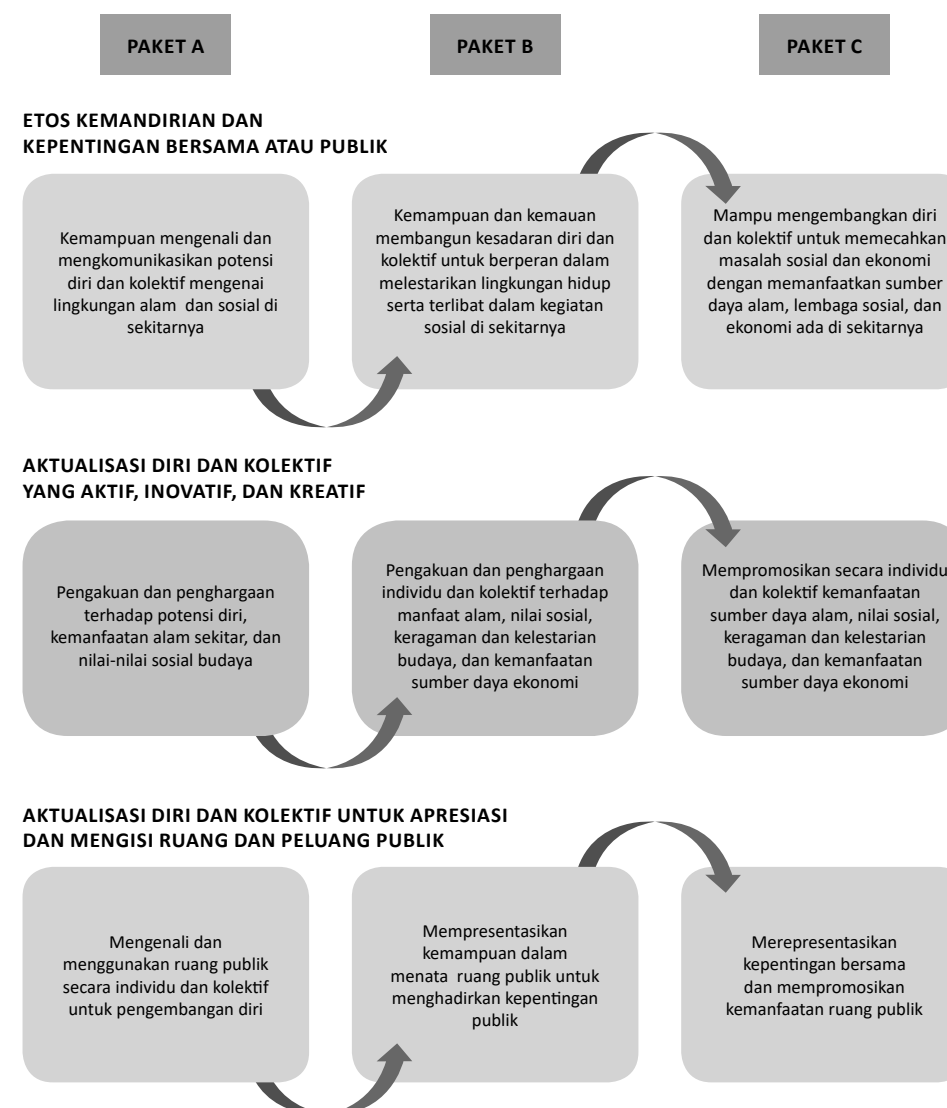
5.3. Capaian keberdayaan yang diharapkan

Melalui dukungan dari kedua faktor diatas, baik etos kemandirian maupun aktualisasi dalam kehidupan publik, pendidikan kesetaraan mampu meningkatkan keberdayaan warga belajar baik untuk memecahkan masalah maupun untuk menumbuhkan aktualisasi diri dan kelompok bagi perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi di ruang atau ranah publik.

Berikut ini, sebagaimana digambarkan dalam diagram 4, kita paparkan paparkan capaian keberdayaan secara keseluruhan yang diharapkan dari praktek pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan dalam tingkatan masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan.

Diagram 4

Capaian Keberdayaan secara keseluruhan dalam masing-masing tingkatan



Sebagaimana dipaparkan diagram 4 diatas, kemampuan mengenali dan mengkomunikasikan potensi diri dan kolektif mengenai lingkungan alam dan sosial sekitar merupakan capaian keberdayaan pertama-tama perlu diraih dalam praktek pendidikan kesetaraan dasar. Selanjutnya, dalam pendidikan kesetaraan menengah kemampuan dan kemauan membangun kesadaran diri dan kolektif untuk berperan dalam melestarikan lingkungan hidup serta terlibat dalam kegiatan sosial sekitar yang lebih luas merupakan keberdayaan penting dicapai. Sedangkan dalam pendidikan kesetaraan tingkat atas warga belajar sebagai warga negara diharapkan mampu mengembangkan diri dan kolektif untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam, lembaga sosial dan ekonomi, di ruang publik.

Capaian keberdayaan demikian itu membutuhkan suatu praktek pendidikan kesetaraan yang memberdayakan. Dalam praktek pendidikan ini selain warga belajar dibekali pengetahuan juga ketrampilan dan sikap dalam menghadapi masalah dan tantangan. Kepemilikan pengetahuan disini sangat penting, namun hal itu belum cukup kalau tidak dibekali suatu ketrampilan baik ketrampilan khusus maupun ketrampilan umum atau kecakapan hidup dalam menghadapi masalah dan tantangan. Pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan dengan demikian merupakan sebuah praktek pendidikan terpadu yang tidak hanya bertumpu pada penguasaan pengetahuan tetapi juga bersandar pada ketrampilan dan sikap dalam mencapai keberdayaan diharapkan baik dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi maupun sebagai sarana pengembangan diri dan aktualisasi perbaikan kehidupan publik.

6

PENILAIAN PEMBERDAYAAN

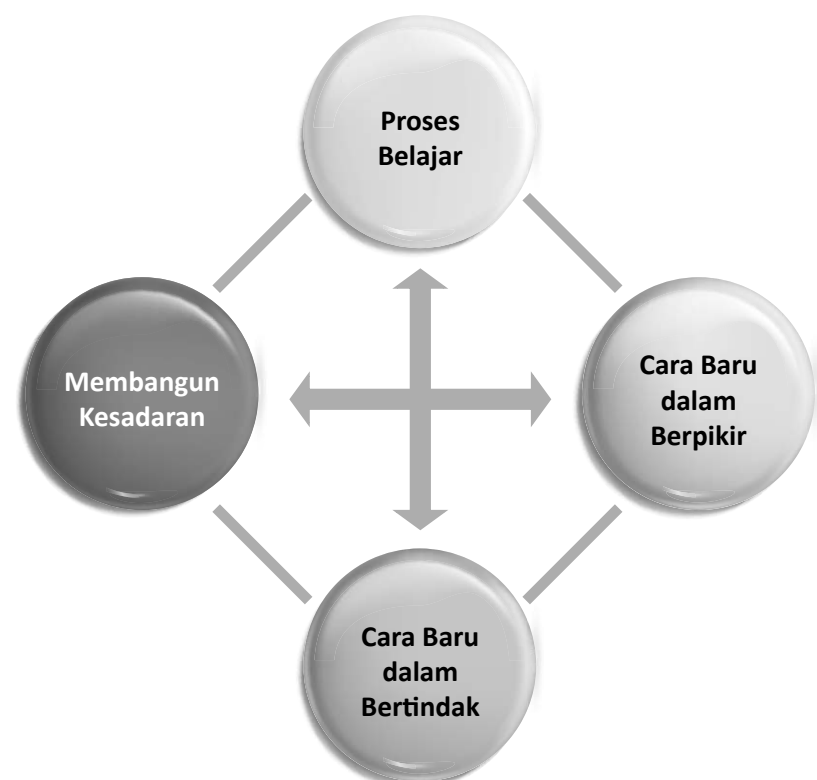
Penilaian kelulusan pendidikan kesetaraan diberikan sesuai standar terdapat pada pendidikan formal dengan sedikit tekanan berbeda sesuai dengan karakteristik khusus dimiliki pendidikan kesetaraan. Sebagaimana terdapat pada pendidikan formal, penilaian dilakukan untuk menilai kemajuan belajar dengan mempertimbangan potensi atau tingkatan awal dimiliki warga belajar, dilanjutkan selama proses belajar sedang berlangsung, hingga kegiatan belajar berakhir atau pada saat kelulusan. Penilaian dalam hal ini diberikan pada penguasaan tiga aspek atau dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari warga belajar.

Khusus dalam menilai keberdayaan warga belajar dalam pendidikan kesetaraan ini aspek atau dimensi ketrampilan perlu mendapat perhatian lebih tersendiri. Termasuk di dalamnya ketrampilan khusus dan ketrampilan umum atau kecakapan hidup. Namun, perlu diketahui bahwa ketrampilan, baik yang khusus maupun yang umum atau kecakapan hidup, tidak mungkin tanpa penguasaan pengetahuan. Demikian pula, ketrampilan harus pula memiliki aspek atau dimensi sikap, khususnya ketika ketrampilan dimaksud harus dan bisa dipergunakan dalam praktek atau dalam dunia kerja. Dalam hal ini, penilaian perlu diberikan dengan mempertimbangkan keterkaitan ketiga aspek atau dimensi tersebut selama proses pendidikan kesetaraan berlangsung hingga pada tahap hasilnya atau pada saat kelulusan dari tingkat keberdayaan dimiliki warga belajar, baik keberdayaan individual dalam arti kemandirian dalam bertindak maupun keberdayaan kolektif, atau dalam kerjasama dengan orang atau pihak lain nantinya dalam dunia sosial atau dalam kehidupan publik. Berikut ini secara teknis dipaparkan bagaimana penilaian itu dilakukan dalam menilai keberdayaan warga belajar setelah menempun pendidikan kesetaraan.

6.1. Prinsip penilaian

Penilaian harus menjadi bagian pemberdayaan dan proses belajar itu sendiri. Penilaian dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak penyelenggara maupun peserta didik. Dengan demikian penilaian bukan bersifat menghakimi, tapi mengapresiasi proses perubahan yang dicapai. Penilaian dilakukan dengan melihat secara komprehensif unsur perubahan yang mengombinasikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Penilaian pada pendidikan kesetaraan untuk pemberdayaan yang sangat menekankan pada kontekstual atau kondisi nyata dan pengalaman peserta didik dan membangun cara pikir dan tindakan yang baru. Beberapa aspek berikut ini penting diperhatikan dalam memberikan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa atau warga belajar, yaitu membangun kesadaran, cara baru dalam berpikir, dan cara baru dalam bertindak.



6.2. Standar penilaian

Penilaian ditekankan pada dua hal pokok. Bagi penyelenggara sekolah penilaian bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Sementara bagi guru atau tutor, penilaian ditekankan pada perubahan pengetahuan baru yang dimiliki, keterampilan baru yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan hidupnya, serta sikap-sikap baru yang mendorong adanya tindakan baru untuk memecahkan masalah, membangun kepekaan dan memperbaiki kehidupannya.

Secara keseluruhan hingga akhir pelaksanaan pendidikan kesetaraan, performa peserta didik untuk setiap jenjang bisa dilihat secara sebagaimana tergambar dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5

Performa peserta didik dalam tiap aspek dan jenjang

JENJANG	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP
Paket A	<ul style="list-style-type: none"> Mengenal potensi diri Mengenal alam sekitar Mengenal nilai sosial sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkomunikasikan potensi diri kepada kawan, keluarga dan tetangga Memanfaatkan sumberdaya alam Memanfaatkan modal sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap ramah kepada kawan, keluarga dan tetangga Merawat dan melestarikan keberadaan tumbuhan dan hewan di benda-benda alam di sekitarnya
Paket B	<ul style="list-style-type: none"> Potensi diri dan kelompok Keragaman dan kemanfaatan alam sekitar Keragaman, kemanfaatan, nilai sosial Keragaman, keindahan, nilai budaya sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> Keterampilan diri dan kelompok dalam komunikasi, kerjasama, negosiasi Keterampilan diri dan kelompok dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Mengorganisir diri dan kelompok untuk memanfaatkan sumberdaya alam
Paket C	<ul style="list-style-type: none"> Potensi diri dan kelompok Keragaman dan kemanfaatan alam sekitar Keragaman, kemanfaatan, nilai sosial Keragaman, keindahan, nilai budaya sekitar Keragaman dan kemanfaatan ruang-ruang publik 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jiwa mandiri dan kerja-kerja kolektif Mengidentifikasi karya-karya budaya untuk menyuarakan kepentingan bersama 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi representasi kelompok memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan diri dan kelompok Memanfaatkan teknologi untuk unjuk karya di ruang publik

6.2 Metode penilaian

Merujuk pada prinsip dan standar penilaian diatas, selanjutnya penilaian dilakukan secara berkala agar perbaikan dan kemajuan yang diharapkan bisa dilakukan. Penilaian dalam hal ini dilakukan menggunakan dua pendekatan; (1) penilaian langsung; menggunakan sarana atau instrumen kuesionair atau wawancara dan diskusi kelompok terfokus; dan (2) penilaian tidak langsung; menggunakan sarana atau instrumen observasi dan unjuk karya atau unjuk kebolehan dalam aspek performa. Melalui dua pendekatan ini, penilaian bisa melibatkan pihak-pihak luar termasuk masyarakat yang mengapresiasi atau menikmati atau mendapatkan hasil guna dari karya yang ditampilkan dan dihasilkan.

PENUTUP

Negara Republik Indonesia memberikan jaminan setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Sebagaimana ditekankan konstitusi pendidikan adalah hak, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehubungan dengan itu, pendidikan nasional diselenggarakan dengan maksud utama membuka atau memberikan akses seluasnya kepada tiap-tiap warga negara mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.

Namun demikian, kondisi objektif perkembangan pendidikan di Indonesia hingga sekarang masih menghadapi masalah tidak semua warga negara mudah mendapatkan pendidikan. Terutama di tingkat menengah bawah dan menengah atas. Masih banyak warga negara karena berbagai sebab dan alasan tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Oleh karena itu, menjawab permasalahan ini, pemberdayaan perlu dilakukan terhadap warga negara yang tidak mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan formal, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang memberdayakan atau menumbuhkan keberdayaan warga belajar dalam mengatasi masalah maupun sebagai alternatif mendapatkan pendidikan di luar sekolah formal.

Pemberdayaan ini dilakukan dengan strategi pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan. Strategi ini meliputi tiga strategi penting, yaitu; (1) memperkuat integritas kepribadian; (2) menumbuhkan sikap kemandirian sebagai warga negara; dan (3) menumbuhkan semangat nasionalis atau cinta bangsa dan negara. Hal itu dilakukan di tiga area pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan, yaitu; (1) kemandirian diri dan kolektif untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi; (2) kemandirian diri dan kolektif untuk apresiasi; dan (3) kemandirian diri dan kolektif untuk kreativitas dan inovasi.

Melalui ketiga area tersebut, pendidikan kesetaraan sebagai pemberdayaan ini diharapkan mampu mencvapai suatu tingkat kapasitas atau kemampuan warga belajar untuk mandiri dalam mengembangkan diri dan dalam memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan publik atau kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

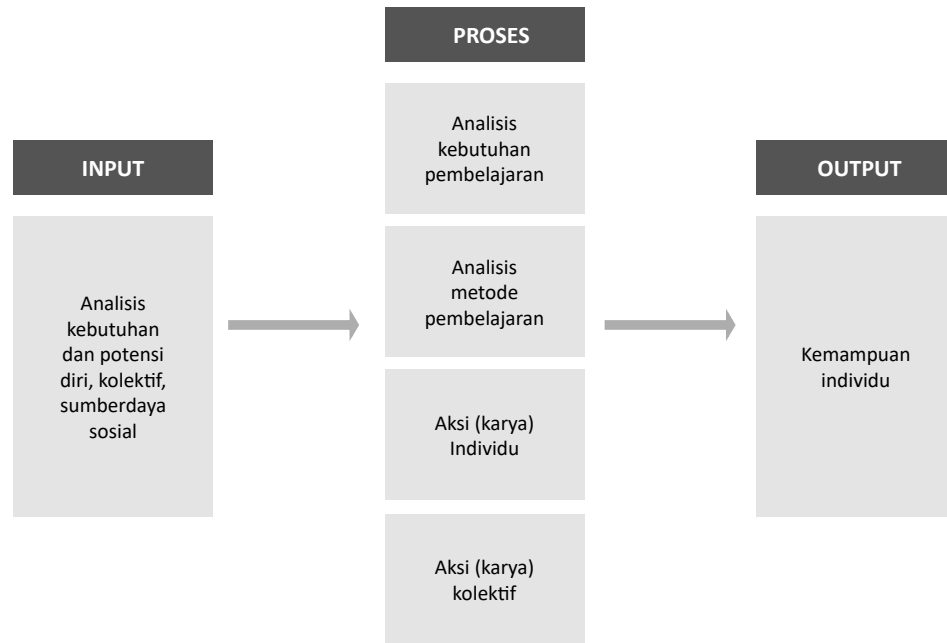
LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Model Pendidikan Pemberdayaan Ekonomi

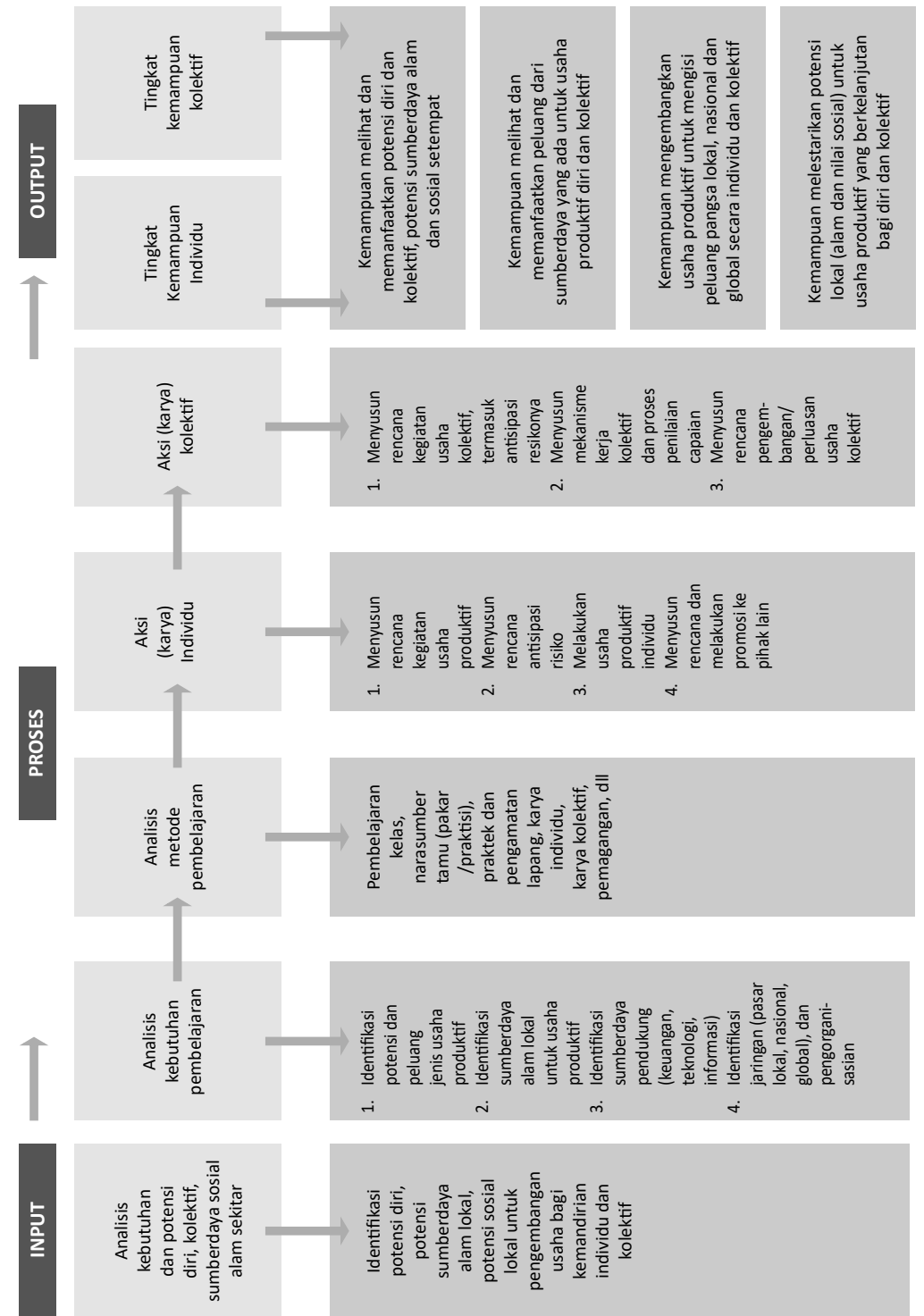
Model pemberdayaan ekonomi diambil sebagai contoh pelaksanaan pendidikan pemberdayaan. Namun demikian model ini bisa diterapkan juga pada model pendidikan pemberdayaan lainnya yang tidak hanya menekankan pemberdayaan pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi dipilih untuk memperkuat salah satu tujuan pendidikan pemberdayaan yakni pemecahan masalah warga belajar. Sebagaimana digambarkan dalam bagan di bawah, pada prinsipnya perlu menekankan tiga hal pokok:

1. **Input**, yang dilakukan lewat analisis kebutuhan dan potensi warga belajar serta sumberdaya alam dan nilai sosial lokal. Hasil analisis ini akan menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pemberdayaan yang diarahkan untuk kemandirian warga belajar secara individu dan kolektif.
2. **Proses**. Ada empat langkah dalam hal ini, yakni analisis kebutuhan pembelajaran yang akan menghasilkan sederet materi pembelajaran bagi warga belajar sesuai hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Kotak kanan menunjukkan hasil dari setiap tahapan proses pada model pemberdayaan ekonomi. Diikuti dengan analisis metode pembelajaran yang sangat mempertimbangkan pendekatan yang komprehensif agar pembelajaran bisa menjawab kebutuhan warga belajar untuk lebih berdaya dalam bidang ekonomi dengan memafaatkan seluasnya sumberdaya lokal. Praktisi lokal merupakan tenaga ahli yang perlu dilibatkan. Pendekatan kelas dan non kelas sangat dianjurkan untuk digunakan dalam pendekatan pembelajaran. Selanjtnya adanya pengembangan proyek karya mandiri warga belajar secara individu. Setiap warga belajar perlu menyusun rencana membuat karya bagi dirinya dengan menerapkan beragam masukan yang diterima dari proses pembelajaran sebelumnya. Kemudian karya individu dipromosikan untuk menjadi proyek bersama atau karya kolektif. Karya kolektif menunjukkan kemampuan yang lebih luas bahwa keberdayaan bersama menjadi salah satu tujuan pemecahan masalah, termasuk lewat sektor ekonomi. Keterampilan sosial akan sangat berguna di tingkat ini, digabungkan dengan sikap-sikap positif lainnya yang terbangun dalam proses pembelajaran.
3. **Output**. Ada dua tingkatan output yang diukur sebagai hasil pembelajaran pemberdayaan, yakni di tingkat individu dan tingkat kolektif. Pengukuran ini menjadi ciri khas pendidikan pemberdayaan. Ada beberapa tingkat kemampuan yang bisa dilihat sebagai ukuran keberhasilan atau capaian pembelajaran pemberdayaan ekonomi bagi warga belajar.

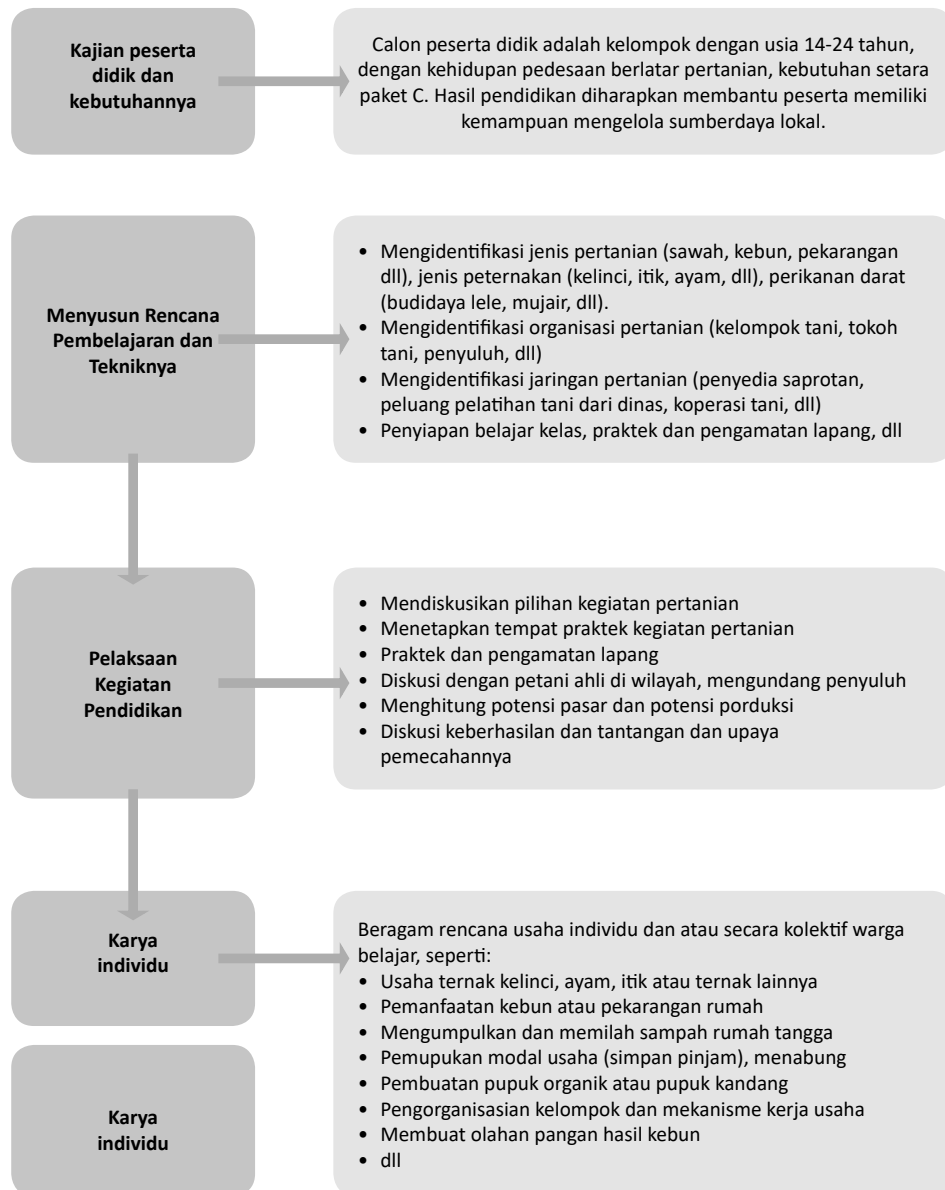
Bagan di bawah menjelaskan secara ringkas isi kegiatan setiap unsur dalam model pendidikan pemberdayaan, yang menunjukkan keterkaitan antara input, proses dan output.



Sementara bagan di bawah memberikan informasi lebih rinci mengenai hasil setiap kegiatan pada masing-masing unsur dalam model pendidikan pemberdayaan ekonomi. Informasi ini akan memberikan gambaran pada tingkat rinci lainnya, untuk Model Pendidikan Pemberdayaan lainnya seperti yang ditunjukkan untuk apresiatif dan tujuan penggunaan peluang dan ruang publik. Harus tetap diingat bahwa unsur tersebut saling terkait.



Contoh 1 : Pendidikan Pemberdayaan Klp Masyarakat Pedesaan Bidang Pertanian



Contoh 2 : Pendidikan Pemberdayaan untuk Apresiasi



Contoh 3 : Pendidikan Pemberdayaan untuk Mengisi Peluang dan Ruang Publik



Lampiran 2: RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan :

Kelas :

Topik/Tema :

Sub Topik/Tema :

Waktu : x menit x 6 hari

A. Deskripsi Umum

.....

B. Kompetensi Inti (KI)

.....

C. Tujuan Pembelajaran

.....

D. Rancang Bangun Pembelajaran

E. Deskripsi Materi Pembelajaran

.....

No	Kompetensi Dasar (Tujuan pembelajaran)	Indikator	Pengalaman Belajar	Materi	Metode	Waktu				Diintegrasikan Dengan Mata Ajar
						Teori	Praktik	Lapangan	Jumlah	
1	Peserta didik mampu menerapkan ...									

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media

.....

2. Alat/Bahan

.....

3. Sumber Belajar

.....

G. Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Belajar 1

Pengalaman belajar 1 diintegrasikan dengan mata ajar X pada pertemuan a, b, dan c dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

2. Kegiatan Belajar 2

Pengalaman belajar 2 diintegrasikan dengan mata ajar X pada pertemuan d, e, dan f dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

3. Kegiatan Belajar 3

Pengalaman belajar 3 diintegrasikan dengan mata ajar Y pada pertemuan a, b, dan c dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

4. Kegiatan Belajar 4

Pengalaman belajar 4 diintegrasikan dengan mata ajar Y pada pertemuan d, e, dan f dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

5. Kegiatan Belajar 5

Pengalaman belajar 5 diintegrasikan dengan mata ajar Z pada pertemuan a, b, dan c dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

6. Kegiatan Belajar 6

Pengalaman belajar 6 diintegrasikan dengan mata ajar Z pada pertemuan d, e, dan f dengan langkah-langkah berikut ini:

.....

H. Penilaian

(Lihat pada bagian khusus tentang penilaian)